

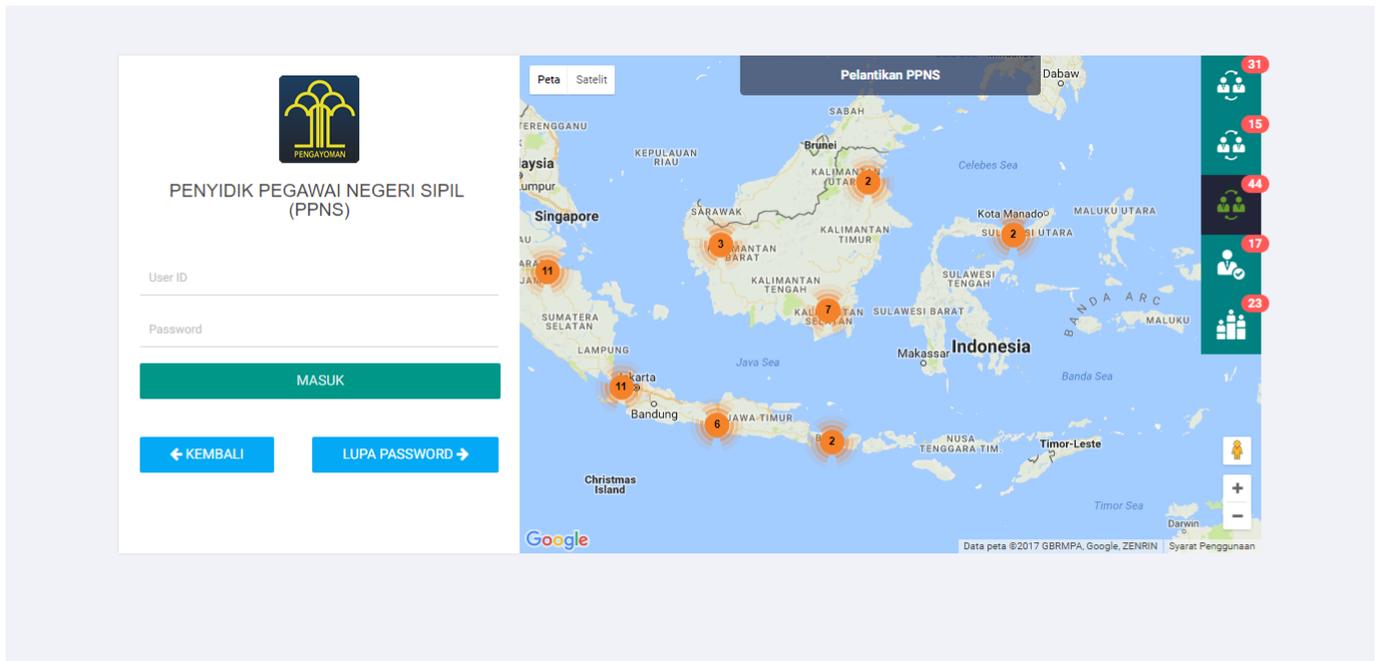
PENGISIAN FORM PEMBERHENTIAN KARENA NTO) PENGAJUAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

HALAMAN UTAMA



Keterangan : Pada gambar diatas adalah halaman awal dari Pembuatan Sistem Informasi PPNS, dimana para user atau pengguna akses terlebih dahulu ke <http://ppns.ahu.go.id/> maka akan tampil halaman diatas.

HALAMAN LOGIN



Keterangan : Pada gambar diatas adalah halaman login dimana para pengguna atau user diharuskan login terlebih dahulu. Akses dengan memasukkan Username dan Password yang telah dibuat, lalu klik tombol **MASUK** untuk akses.

DAFTAR TRANSAKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Nomor Surat	Kementerian Lembaga	Instansi	Bulan	Tahun	Data Terkirim (Jumlah)	Aksi
1	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Diterima (1)	Daftar Pemohon Download Surat Petikan
2	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
3	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017		Daftar Pemohon Hapus Nomor Surat
4	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
5	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon

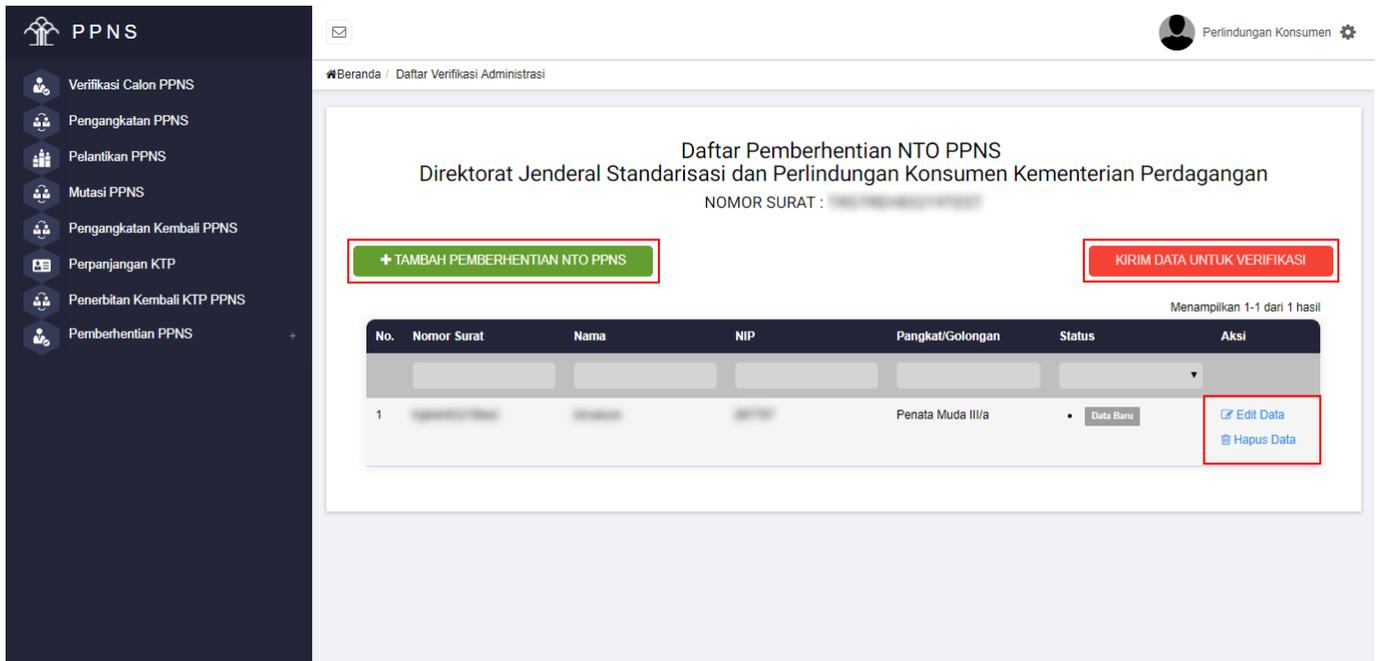
Keterangan : Pada gambar diatas adalah Daftar transaksi dari pengajuan Pemberhentian NTO PPNS dimana setiap pengajuan per nomor surat akan masuk ke dalam daftar tersebut. Tahap selanjutnya klik tombol **+ TAMBAH NOMOR SURAT** untuk pengajuan pertama kali.

FORM PENAMBAHAN NOMOR SURAT

The screenshot shows the 'Nomor Surat Pemberhentian NTO PPNS' form in the PPNS application. The form is divided into two columns. The left column contains dropdown menus for 'Kementerian Lembaga *' (set to 'Kementerian Perdagangan'), 'Instansi *' (set to 'Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen'), 'Nomor Surat *', 'Tanggal', 'Perihal', 'Nama Pengusul *', and 'Jabatan Pengusul *'. The right column contains text input fields for 'MASUKKAN NOMOR SURAT', 'MASUKKAN TANGGAL SURAT', 'MASUKKAN PERIHAL', 'MASUKKAN NAMA PEJABAT SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONAN', and 'MASUKKAN JABATAN PEJABAT YANG SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONAN'. A red box highlights these five input fields. Below the right column is an 'Upload Surat Permohonan *' section with a 'Pilih File' button and a message 'Tidak ada file yang dipilih'. At the bottom of the form are two buttons: 'BATAL' (red) and 'SIMPAN' (green).

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Form input penomoran surat Pemberhentian NTO PPNS Dimana Kementerian/Lembaga harus memasukkan nomor, tanggal dan perihal yang tercantum pada surat pengajuan dan upload surat permohonan tersebut. Lalu klik tombol **SIMPAN** jika sudah selesai penginputan. Atau klik Tombol **BATAL** untuk kembali ke Halaman Daftar Pemberhentian NTO PPNS

DAFTAR PEMOHON



Keterangan : Pada gambar diatas adalah Halaman Daftar Pemohon, dimana user kementerian/lembaga bisa mengklik tombol **+ TAMBAH PEMBERHENTIAN NTO PPNS** untuk menambahkan input peserta yang ada. Jika sudah dilakukan penginputan tetapi masih ada data yang salah user bisa mengklik "EDIT DATA" tetapi jika sudah selesai meinput form pengisian dan yakin, user bisa mengklik tombol **KIRIM DATA UNTUK VERIFIKASI** maka data yang sudah dikirim akan langsung diverifikasi oleh tim dan tidak bisa di edit kembali.

FORM PENGISIAN

Pemberhentian NTO PPNS

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan
Nomor Surat : XXXXXXXXXX

Cari Data PPNS

Permohonan Dibawah 2010

Nama * <small>Masukkan Nama</small>	NIP * <small>Masukkan NIP</small>	Gelar Depan <small>Masukkan Gelar depan</small>
<input style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; border: none; border-radius: 3px; margin-right: auto;" type="button" value="+"/>		
Gelar Belakang <small>Masukkan Gelar belakang</small>	Jabatan * <small>Masukkan Jabatan</small>	Pangkat/Golongan * --PILIH--
<input style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; border: none; border-radius: 3px; margin-right: auto;" type="button" value="+"/>		
Jenis Kelamin * --PILIH--		

Wilayah Kerja

Provinsi * --PILIH--	Kabupaten/Kotamadya *	Kecamatan
<input style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; border: none; border-radius: 3px; margin-right: auto;" type="button" value="+"/>		
Kementerian/LPNK * Kementerian Perdagangan	Unit * Direktorat Jenderal Standarisasi	<input type="checkbox"/> Nama Wilayah Kerja Unit/PT <small>masukkan nama unit pelaksana teknis</small> <small>Diisi Jika Wilayah Kerja Menyebutkan Nama Unit/PT</small>
UU di Kawal * Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3621) a		
<input style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; border: none; border-radius: 3px; margin-right: auto;" type="button" value="+"/>		

A. SK Pengangkatan Pejabat PPNS

Nomor SK Pengangkatan PNS * Masukkan Nomor SK Pengangkatan PNS

Tanggal SK Pengangkatan PNS * Masukkan Tanggal SK pengangkatan PNS

B. SK Kenaikan Pangkat

Nomor SK Kenaikan Pangkat * Masukkan Nomor SK Kenaikan Pangkat

Tanggal SK Kenaikan Pangkat * Masukkan Tanggal SK Kenaikan Pangkat

C. KTP PPNS

Nomor KTP * Masukkan Nomor KTP

Tanggal Berlaku KTP * Masukkan Tanggal Berlaku KTP

D. Persetujuan Dari Instansi Yang Bersangkutan

Nomor SK Pemberitahuan Pemberhentian Masukkan Nomor SK Pemberitahuan Pemberhentian

Tanggal SK Pemberitahuan Pemberhentian Masukkan Tanggal SK Pemberitahuan Pemberhentian

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN
(Ekstensi PDF besar file maksimum 10 MB)

Melampirkan Fotocopy keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS
 Tidak ada file yang dipilih *File Harus Berupa PDF.

Melampirkan Fotocopy keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir
 Tidak ada file yang dipilih *File Harus Berupa PDF.

Melampirkan Kartu Asli Tanda Pengenal Pejabat PPNS
 Tidak ada file yang dipilih *File Harus Berupa PDF.

Melampirkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian dari Dirjen masing-masing Instansi
 Tidak ada file yang dipilih *File Harus Berupa PDF.

Dokumen fisik tidak perlu dikirim ke Kementerian Hukum & HAM, Dokumen fisik wajib disimpan kepada masing-masing instansi pemohon.

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Form penginputan pengajuan transaksi Pemberhentian NTO PPNS. Dimana user menginput sesuai dengan data yang ada. Pada wilayah kerja klik tombol **TAMBAH DATA** untuk menambahkan wilayah lebih dari satu. Pada persyaratan masukkan lampiran yang berbentuk "PDF" klik pada tombol "BROWSE". Jika form sudah diisi semua, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan datanya, jika masih belum yakin klik tombol **KEMBALI** untuk kembali ke halaman daftar transaksi.

DOWNLOAD SURAT PEMBERHENTIAN PPNS

No	Nomor Surat	Kementerian Lembaga	Instansi	Bulan	Tahun	Data Terkirim (Jumlah)	Aksi
1	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Diterima (1)	Daftar Pemohon Download Surat Petikan
2	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
3	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017		Daftar Pemohon Hapus Nomor Surat
4	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon
5	[Redacted]	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	November	2017	Belum Terkirim (1)	Daftar Pemohon

Keterangan : Pada gambar diatas adalah Form download surat hasil keluaran Pemberhentian sebagai PPNS. Klik pada Aksi "Download Surat Petikan" pada login Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pemberhentian_ppns_karena_nto

Last update: **2017/12/06 04:35**